

PERKEMBANGAN ORGANISASI BURUH DI SURABAYA TAHUN 1950-1959**Agus Prayitno**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail: Aguskrebosby@gmail.com.

Anik Andayani

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Organisasi buruh di Indonesia senantiasa menjadi sasaran pengaruh ideologi, teristimewa pengaruh-pengaruh komunis dan sosialis. Kondisi sosial ekonomi dan politik yang terjadi turut serta dalam mempengaruhi perkembangan gerakan buruh. Gerakan buruh Indonesia berperan penting dalam proses dekolonisasi dan pembentukan bangsa. Perubahan sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional merupakan program pemerintah Indonesia pasca pengakuan kedaulatan dari Belanda. Dalam rangka perjuangan pengembalian Irian Barat, pemerintah Indonesia membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar dan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Surabaya sebagai salah satu kota industri di Indonesia merupakan basis perjuangan gerakan buruh. Kaum buruh Surabaya menjadi pelopor dalam langkah pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda di Surabaya.

Kata kunci: Organisasi Buruh, Gerakan, Ekonomi dan Politik

Abstract

Workers organization in Indonesia has been always targeted as spreading of ideology, especially communism and socialism. Socio-economic and political conditions has influenced development of the workers movement. Workers movement which has been always side by side with national struggle had an important role in decolonization and nation building. Colonial economic system has been changed into national economical system is Indonesia's government program after the recognition of Indonesia sovereign from Netherland. In phase of struggle in West-Papua, Indonesia government rejected the result of Round Table Conference and nationalize of dutch companies. Surabaya as one of industrial city in Indonesia, have roles as a basic of labour movement. Workers in Surabaya take a lead role in step of occupying dutch companies in Surabaya.

Keywords: Labour Organization, Movement, Economic and Political

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Buruh merupakan kategori penting dalam retorik pendobrakan sistem lama menuju pembentukan bangsa baru, bukan hanya sebagai alasan mengapa perjuangan itu perlu, tapi juga sebagai pelaku perjuangan. Rujukan ke kondisi buruh yang tereksplotasi dan tertindas merupakan tema yang sering muncul dalam pidato-pidato maupun pamflet para tokoh politik. Berbagai tokoh politik, dengan menggunakan simbol Islam, sosialisme, atau nasionalisme sebagai seruan perjuangan, mengacu ke penderitaan rakyat buruh sebagai kondisi utama penjajahan.¹

Abad ke-19 adalah abad paling revolusioner dan penuh perubahan dalam sejarah Indonesia. Di abad itu pula struktur masyarakat kapitalistik terbentuk. Di abad ini telah ada buruh karena industrial kapitalistik yaitu hubungan buruh dengan modal untuk memproduksi barang dagangan secara masal telah dimulai sejak 1830.² Setelah 1870 perkembangan industri menjadi demikian pesat.

Serikat-serikat buruh orang-orang Eropa di Hindia Belanda berdiri sejak akhir abad ke-19. Dalam perkembangan selanjutnya dengan iklim yang cukup liberal berbagai organisasi buruh berjamuran terutama di Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Berdirinya serikat buruh dari golongan bangsa Belanda itu pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan kejadian di Belanda yang sedang mengalami pertumbuhan pergerakan buruh sekitar tahun 1860-1870.³

Surabaya yang merupakan salah satu kota industri di Indonesia merupakan basis besar serikat buruh. Sejak periode kolonial hingga kemerdekaan, buruh Surabaya senantiasa berperan dalam upaya-upaya menentang kolonialisme Belanda. Pemogokan Buruh pelabuhan di Surabaya pada Agustus 1921 dan pemogokan buruh Kereta Api tahun 1923 menjadi bukti bahwa Surabaya memiliki dinamika perburuhan yang luar biasa mulai awal perkembangannya.⁴

¹ Saptari, Ratna. 2013. "Bangsa dan Politik Perburuhan dalam Proses Dekolonisasi" dalam Erwiza Herman dan Ratna Saptari (ed.), *Dekolonisasi: Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, hal: 1-2

² Cahyono, Edi dan Soegiri. 2003. *Gerakan Serikat Buruh, Perburuan dari Masa ke Masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru (Indonesia 1998)*, Jakarta: Hasta Mitra, hal: 3

³ Sandra, 2007. *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*, Jakarta: TURC, hal: 4

⁴ Ingleson, John. 2004. *Tangan dan Kaki Terikat: dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*. Hal: 19

Bagi seluruh rakyat Indonesia dan khususnya kaum buruh, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dirasakan sebagai pembebasan dari penjajahan dan eksploitasi modal asing yang didukung oleh pemerintah kolonial. Pemerintah nasional menjadi faktor penting dalam perjuangan kaum buruh untuk memperbaiki kesejahteraannya.⁵ Secara terbuka kaum buruh bersama kekuatan sosial lain melibatkan diri dalam revolusi politik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Segera setelah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta, para pegawai kantor-kantor pemerintah, jawatan,-jawatan dan perusahaan-perusahaan, dan pabrik-pabrik milik swasta yang dioperasikan oleh para pembesar Jepang, membentuk organisasi-organisasi perjuangan dengan maksud mengambilalih dinas-dinas dan perusahaan-perusahaan ini dari Jepang dan menyatakannya sebagai milik Republik.⁶

Pasca penyerahan kedaulatan tahun 1949, yakni di periode 1950-an adalah masa pembangunan kembali serikat-serikat buruh di Indonesia. Dalam tahun-tahun setelah 1950, tidak saja ratusan serikat buruh baru dibentuk oleh kaum buruh, tetapi juga berbagai federasi baru. Pembentukan serikat dan federasi tersebut tentunya tidak terlepas dari pengaruh ideologi dan partai-partai politik.

Di awal tahun 1950-an, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengikat leher kaum buruh yang terus-menerus berjuang menaikkan tingkat upahnya, dan untuk membela hak-hak demokrasi adalah pertama, diadakannya Peraturan Kekuasaan Militer Pusat No.1 tahun 1950 oleh Pemerintah Natsir, yang berisi larangan mogok bagi kaum buruh di perusahaan-perusahaan vital yang praktis berlaku bagi semua perusahaan, dan kedua setelah peraturan tersebut terus dilawan oleh massa kaum buruh, pada tahun 1951 oleh Menteri Iskandar Tedjkusuma dalam Pemerintahan Sukiman diadakan peraturan yang isinya tidak lain adalah larangan mogok bagi kaum buruh di semua perusahaan.⁷

Kenyataan itu menimbulkan berbagai spekulasi yang berhubungan dengan adanya keadaan yang dapat

⁵ Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hal: 38

⁶ Tedjasukmana, Iskandar. 2008. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. Jakarta: TURC, hal:26

⁷ Sadali. 2002. *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*. Jakarta : Pustaka Pena, hal: 72

dikategorikan sebagai sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di dalam diri buruh di Indonesia. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa masalah yang ada di sekitar buruh tidak lagi dapat dipahami sekedar sebagai fenomena dan kenyataan sosial semata, melainkan juga persoalan politik Indonesia saat ini secara menyeluruh.

Sehubungan dengan dibatalkannya perjanjian KMB pada tahun 1956, serikat-serikat buruh memberikan dukungan kepada pemerintah untuk segera mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda.⁸ Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang (UU) yang mengatur jalannya pengambilalihan yang oleh pemerintah disebut sebagai nasionalisasi pada akhir tahun 1958.

Tulisan ini akan mencoba menelusuri perkembangan organisasi buruh. Bagaimana perkembangannya di masa kolonial hingga akhir tahun 1959, kebijakan politik perburuhan serta bagaimana peran buruh dalam nasionalisasi perusahaan Belanda di Surabaya?

Penulis mencoba merekonstruksi kembali berdasarkan dokumen-dokumen sejarah serta menelaah dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga mampu memahami proses berkembangnya organisasi buruh, kebijakan politik perburuhan dan peran buruh dalam nasionalisasi perusahaan Belanda di Surabaya.

Sejauh ini telah muncul beberapa studi tentang gerakan buruh. Soegiri dan Edi Cahyono "*Gerakan Serikat Buruh, Perburuan dari Masa ke Masa : Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*"⁹. Pertama, studi ini menekankan pada serikat buruh dan prospek perjuangan kelas. Kedua, mengenai perkembangan buruh di Indonesia dalam berbagai periode kesejarahan yaitu sejak jaman kolonial hingga Orde Baru.

Selanjutnya Sadali "*Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*"¹⁰ memberikan gambaran tentang sejarah perkembangan buruh mulai awal munculnya hingga sekitar kemerdekaan Indonesia. Penjelasan mengenai SOBSI sebagai salah satu organisasi buruh mendapat porsi yang lebih banyak dalam studi ini.

Sandra "*Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*"¹¹ menjelaskan tentang lahirnya pergerakan buruh yang mendapat pembinaan dari partai-partai politik yang pasang surut selanjutnya tidak terpisah dari apa yang

dialami oleh perjuangan pergerakan nasional dalam mencapai kemerdekaan tanah air. Studi ini memberi gambaran perkembangan buruh hingga akhir tahun 1950-an.

Iskandar Tedjasukmana dalam karyanya "*Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*"¹² berusaha memetakan pengaruh ideologi politik di dalam serikat buruh. Bagaimana serikat buruh menerjemahkan konsep-konsep besar ke dalam program perjuangannya yang nantinya akan menentukan watak dan arah perjuangan serikat buruh.

Bondan Kanumoyoso "*Nasionalisasi perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia*"¹³ membahas keterkaitan antara masalah ekonomi dan politik di Indonesia. Perubahan sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional merupakan masalah pokok dari buku ini. Titik sentralnya adalah nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, 1957-1959.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sumber sejarah. Proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau¹⁴, menjadi acuan yang utama. Penulis akan melakukan pelacakan sumber sejarah terkait perkembangan organisasi buruh di Surabaya.

Langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah yaitu *heuristik*, *kritik*, *interpretasi* dan *historiografi*. Langkah pertama, *heuristik*, penulis akan melakukan pelacakan sumber hasil penelitian terdahulu, baik yang dipublikasikan maupun referensi pribadi. Sumber yang dimaksud adalah semua hal yang berhubungan dengan organisasi buruh di Surabaya selama tahun 1950-1959. Dalam penggalan sumber sejarah tersebut, peneliti mengunjungi badan arsip dan perpustakaan, baik di Surabaya ataupun tingkat nasional di Jakarta.

Langkah kedua yaitu *kritik*, kritik sumber yang dimaksud adalah menguji dan memastikan keaslian sumber dan nara sumber yang terkait. Langkah ini dengan melakukan kritik ekstern (kebenaran sumber) dan kritik intern (relevansi sumber).

Langkah ketiga yaitu *interpretasi*, langkah untuk menganalisis semua sumber yang didapatkan, dalam kaitannya dengan perkembangan organisasi buruh di Surabaya. Interpretasi yang dilakukan melalui sumber yang didapat dengan memfokuskan pada rumusan

⁸ Kanumoyoso, Bondan. *Op. cit.*, hal: 44

⁹ Cahyono, Edi dan Soegiri. *Op.cit*

¹⁰ Sadali. *Op.cit.*,

¹¹ Sandra. *Op.cit.*,

¹² Tedjasukmana, Iskandar. *Op.cit.*,

¹³ Kanumoyoso, Bondan. *Op.cit.*,

¹⁴ Louis Gottschalk, 1981, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, hal: 3

masalah yang ditetapkan. Relevansi sumber yang ada dengan hasil interpretasi akan membantu proses rekonstruksi sejarah yang diteliti.

Langkah keempat yaitu *historiografi*, proses penulisan sejarah secara sistematis dan kronologis.¹⁵ Historiografi yang dilakukan diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian mengenai "Perkembangan Organisasi Buruh di Surabaya tahun 1950-1959"

A. Perkembangan Organisasi Buruh di Indonesia Masa Kolonial

Kolonialisme Hindia Belanda dimulai abad ke-19 melakukan pembongkaran-pembongkaran di Indonesia. Di awal abad itu konsep negara kolonial Hindia Belanda disiapkan oleh Herman Willem Daendels (1808-1811) seorang pengagum revolusi Perancis untuk mempertegas pengelolaan wilayah koloni yang sebenarnya hanya merupakan mitra perdagangan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Thomas Stamford Raffles, dalam kurun pemerintahannya yang singkat di Jawa (1811-1816), telah meletakkan dasar-dasar penting bagi perubahan mendasar di Jawa. Perubahan sosial paling penting dalam masyarakat Kolonial Hindia Belanda adalah ketika pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberlakukan *Cultuurstelsel* tahun 1830¹⁶ dan Undang-undang Agraria tahun 1870.

Kathryn Robinson menilai sistem tanam paksa telah merubah pola hubungan sosial masyarakat dari komunal pedesaan menuju modernisasi, seiring dengan perubahan kebijakan merkantil ekonomi kolonial menuju ke arah perkembangan perusahaan kapitalis.¹⁷ Dalam pertengahan tahun 1830, pemerintah kolonial mulai melakukan aktivitas merekrut tenaga kerja. Secara resmi petani diserap melalui kontrak kerja. Untuk membantu perekrutan ini, kepala desa sangat besar perannya sebagai mediasi antara *gubernen* dengan kaum tani yang akan dijadikan buruh. Seperti, kepala desa yang melakukan pembagian tanah *gogol*, kepala desa pula yang mengadakan pengaturan *cultuurdienst*

atau kerja penanaman tanaman ekspor di onderneming gula.¹⁸

Cultuurdienst ini memberi jaminan kepada perkebunan akan adanya persediaan tenaga kerja yang cukup untuk tanaman mereka. Jika perkebunan menghendaki lebih banyak petani untuk menyediakan lebih banyak kerja, perkebunan harus membayar upah, yang disebut *glidig* untuk kerja tambahan, tetapi kerjanya sendiri adalah kewajiban. Jika petani tidak dapat memnuhi *cultuurdienst* ini, ia harus membayar dengan uang tunai, yang juga disebut *glidig*.¹⁹

Berdasarkan laporan *Commissie* Umbgrove tampak bahwa wajib kerja *onderneming* tidak harus dilandaskan pada penguasaan tanah. Sehingga *sikep* hampir selalu terhindar dari menyumbangkan tenaganya. Namun beberapa lapisan sosial dibawah seperti *menoempang*, *boedjang* lebih merupakan buruh ketimbang lapisan sosial berakses tanah. Dua klasifikasi sosial belakangan adalah potensial menjadi buruh. Dari penyudutan lapisan sosial bawah yang mengakar dalam desa inilah, mendorong lahirnya *vrije arbeid*, yaitu sekelompok orang memasuki orbit pabrik-pabrik gula menawarkan diri tanpa diperintah oleh para pamong ataupun atasannya.²⁰

Dalam hal pertanahan, para kapitalis perkebunan tersebut diperkenankan melakukan penyewaan tanah jangka panjang selama 75 tahun disebut *erfpacht*. Dengan kekuasaan uangnya mereka berhasil memaksa desa-desa menyewakan tanah-tanah desa dan biasanya dengan memberikan premi tertentu kepada kepala-kepala desa. Sawah milik desa (komunal) dari petani dijadikan perkebunan-perkebunan, sedang penduduknya secara massal dijadikan kulinya.²¹

Kaum buruh Indonesia di zaman kolonial bukan hanya hidup dengan syarat-syarat dibawah minimum, tetapi mereka terikat oleh kontrak-kontrak yang dipaksakan oleh pemerintah Hindia Belanda menurut *koeli ordonantie* dan juga terikat oleh apa yang dinamakan *poenale sanctie* yang menetapkan ketentuan-

¹⁵ Nugroho Notosusanto, 1978, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu press, hal: 6

¹⁶ Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, cet I*. Jakarta: Serambi, hal: 260

¹⁷ Saskia Eleonora. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, hal: 85

¹⁸ Cahyono, Edi. 1991. "Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan: Studi Karesidenan Pekalongan 1830-1870" *Prisma*. No.11, hal: 1-2

¹⁹ Takashi Shiraisi. 1990. *Zaman Bergerak : Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. New York : Cornell University Press, hal : 21

²⁰ Cahyono, Edi. Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan: Studi Karesidenan Pekalongan 1830-1870, *op. cit.*, hal: 11

²¹ Gie, Soe Hok. 1999. *Di Bawah Lentera Merah*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, hal : 7-8

ketentuan hukuman bagi mereka yang menyalahi kontrak.²² Dengan demikian, maka perbudakan *poenale sanctie* telah mengganti perbudakan *culturstelsel*, sehingga baik di zaman *cultuurstelsel* maupun dizaman imperialis, rakyat Indonesia terutama kaum buruh dan tani miskin tetap hidup dibawah perbudakan dan penghisapan kaum penghisap dan penindas asing tuan-tanah bumiputera.²³

Serikat-serikat buruh orang-orang Eropa di Hindia Belanda berdiri sejak abad ke-19. Perkembangan selanjutnya dalam keanggotaan serikat-serikat buruh ini tidak hanya merekrut anggota *impor* saja, akan tetapi juga menerima kalangan bumiputera. Program pendidikan yang merupakan salah satu program dalam politik balas jasa *Eitische Politiek* di awal 1900 memberi nuansa baru dalam perkembangan intelektual bumiputera.

Dalam kongres PPPB di Bandung pada bulan Mei 1919, pemimpin SI Raden Sosrokardono yang juga menjadi pemimpin PPPB, menganjurkan supaya semua serikat buruh digabungkan secara federatif dalam satu vaksentral. Dalam kongres ini ada persesuaian pendapat antara Semaun dan Sosrokardono, tentang perlunya satu vaksentral, dan tentang tujuan gerakan buruh untuk mencapai pemerintahan sendiri. Hal ini juga dilontarkan dalam kongres SI ke IV, Oktober 1919, di Surabaya. Soerjopranoto memperkuat untuk realisasi PPKB. Berdirilah PPKB dengan Semaun sebagai ketua dan Soerjopranoto sebagai wakil ketua.²⁴

Atas inisiatif *Revolutionnaire Vakcentrale* pada tanggal 25 Juli 1922 di Surabaya diadakan rapat bersama serikat – serikat buruh. Dalam rapat itu dinyatakan pentingnya diadakan fusi antara *Revolutionnaire Vakcentrale* dengan PPKB. Usaha ini berhasil dengan tercapainya fusi dalam rapat yang sengaja diadakan untuk itu di Madiun pada tanggal 3 September 1922 dengan nama Persatuan Vakbond Hindia (PVH). Dalam PVH tergabung VSTP, PPPB, *Kweekschool Bond*, Perhimpunan Guru Bantu (PGB) dan lain-lainnya. Yang tergabung dalam PVH tersebut adalah serikat-serikat buruh pemerintah dan swasta yang seluruh anggotanya berjumlah tidak kurang dari 40.000 orang.²⁵

Pemogokan-pemogokan dengan mengandalkan organisasi mulai gencar terjadi di tahun 1920-an. PFB tahun 1920-an memobilisasi pemogokan disebabkan majikan menolak mengakui PFB sebagai organisasi

²² Jan Breman, 1997. *Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20*, Grafiti Pers, hal : xxii

²³ Sakirman. 1959. *Tentang Ekonomi dan Keuangan (pdf format)*. Ekonomi dan Masyarakat No.1, <http://www.geocities.com/edichahy>, hal: 10

²⁴ Cahyono, Edi dan Soegiri DS, *op. cit.*, hal: 12

²⁵ Sadali. 2002. *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*. Jakarta : Pustaka Pena, hal 35

yang mewakili anggotanya. Di Surabaya pada 15 November 1920 pada *Droogdok Maatschappij* terjadi pemogokan diikuti sekitar 800 buruh. Agustus 1921 pemogokan terjadi di lingkungan buruh pelabuhan Surabaya. Medio Januari 1922 pegawai pegadaian mogok. Mencakup 79 rumah-gadai dengan sekitar 1.200 buruh (PPHB). Buruh kereta api dan tram (VTSP) didukung sekitar 8.500 buruh mogok pada April 1923.²⁶

Dalam merespon aksi-aksi buruh tersebut pemerintah kolonial mengadakan peraturan Dewan Perdamaian Untuk Spoor dan Tram di Jawa dan Madura yang diharapkan menjadi perantara bila terjadi perselisihan industrial. Namun kemudian pemerintah kolonial merasakan bahwa pemogokan mempunyai tujuan politik untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Untuk itu pada 10 Mei 1923 diumumkan undang-undang larangan mogok yang dikenal dengan artikel 161 bis.

Namun artikel ini bukan alat ampuh menyetop pemogokan. Percetakan *van drap* di Surabaya juga mengalami pemogokan pada 1 September; sedang pada 5 oktober dan 9 November permogokan terjadi di pabrik mesin *N.I.Industrie* dan *Braat*. Serikat Boeroeh Bengkel dan Elekteris (SBBE) mogok pada 14 Desember 1925, mencakup 7 pabrik mesin dan kontruksi. Penyebab pemogokan adalah *Vereeniging van Machinefabrieken* yang membawahi 7 pabrik tersebut memutuskan tidak ingin berhubungan dengan SBBE.

Setelah terjadinya pemogokan di Surabaya, organisasi anggota PVH yang sebelumnya banyak mengadakan tekanan kepada pengusaha tidak lagi terdengar aktivitasnya. Hal ini terutama dikarenakan ditangkapnya pengurus-pengurus yang dituduh sebagai komplotan kaum komunis yang hendak merobohkan kekuasaan. Dengan tidak adanya pimpinan, suasana ketakutan diantara banyak anggota meliputi hampir dimana-mana. Praktis dapat dikatakan bahwa perputaran roda organisasi berhenti sama sekali.

Dalam keadaan ekonomi yang mengalami krisis sebagai akibat meningkatnya krisis dunia yang mencapai puncaknya pada tahun 1929, terjadi kemerosotan pendapatan upah kerja. Gambaran tentang luasnya pekerjaan di perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik, kebun atau tempat kerja lainnya, terus menunjukkan penurunan. Pengurangan tenaga kerja terus berjalan, melumpuhkan persatuan-persatuan yang digalang di tiap-tiap tempat pekerjaan.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah pemberian pemerintah jajahan, melainkan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia. Jadi pertama-tama sesudah proklamasi, perjuangan buruh tidak untuk kepentingan buruh sendiri, akan tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk merebut kekuasaan perusahaan-perusahaan dari tangan musuh dan menyerahkannya

²⁶ Sandra, 2007. *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*, Jakarta : TURC, hal : 24

kepada pemerintah Republik Indonesia. Untuk mengatasi keperluan-keperluan yang mendadak, Maruto Nitimihardjo mendirikan *Committee van Actie* pada tanggal 18 Agustus 1945 yang ada Barisan Buruh Indonesia (BBI) menjadi bagiannya.²⁷

Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia juga datang dari buruh di luar negeri. Buruh pelabuhan Australia yaitu *Australian Seamen's Union* dan *Australian Waterside Workers Union* melakukan aksi bersama. Semula dengan aksi-aksi ringan, kemudian meningkat menjadi pemogokan dan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda. Di Pelabuhan Sydney, kapal Belanda *karsik* bermuatan uang dan emas yang baru datang dari Melbourne disambut demonstrasi oleh awak kapalnya. Di Brisbane, di kapal *Kun Hwa*, kapal *Jansens* dan kapal *Both* juga terjadi pemogokan. Solidaritas di kalangan kaum buruh Australia terkenal dengan nama *Bunnerong Strike* yang terjadi pada awal Oktober 1945.²⁸

B. Kebijakan Politik Perburuhan Masa Orde Lama

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, dikeluarkan beberapa undang-undang yang cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan pada buruh. Sejumlah undang-undang juga lahir sebagai bentuk ratifikasi dari Konvensi International Labour Organization (ILO). Sumbangan bagi keberhasilan mencapai kemerdekaan menjamin gerakan buruh mendapat posisi yang baik setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Hal ini tampak dalam pembuatan kebijakan dan hukum perburuhan di Indonesia.

Beberapa Undang-undang Perburuhan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia hingga tahun 1959 antara lain Undang-undang tentang kecelakaan kerja, pengawasan perburuhan, perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan, hak untuk berorganisasi, dan penyelesaian perselisihan perburuhan.

Pada masa Perdana Menteri Mohammad Natsir diumumkan Dekrit Militer No. 1 yang melarang pemogokan-pemogokan di perusahaan-perusahaan vital pada 3 Februari 1952. Serikat-serikat buruh enggan menuruti perintah itu dan memulai suatu kampanye untuk pembatalan Dekrit Militer tersebut.

Kabinet baru yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo dilantik pada 27 April 1951, mengumumkan bahwa Dekrit Militer No.1 akan

²⁷ S.K. Trimurti. 1980. *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*. Jakarta : Yayasan Idayu, hal: 16-17

²⁸ Sadali. *op. cit.*, hal: 58

digantikan dengan sebuah undang-undang mengenai penyelesaian-penyelesaian perburuhan yang tidak akan meliputi suatu larangan mogok. Pada bulan september 1951 Undang-undang Darurat No.16 mengenai Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang itu memberlakukan suatu masa menunggu selama tiga minggu bagi serikat-serikat buruh setelah mereka menyatakan niat mereka untuk mogok, dan bagi pengusaha yang mau melarang bekerja kaum buruh mereka. Lebih jauh undang-undang itu menentukan suatu sistem perantaraan paksa dan arbitrase paksa.²⁹

C. Pembentukan dan Aktivitas Organisasi Buruh di Surabaya

Kaum komunis telah mengambil prakarsa dalam pembentukan SOBSI pada tahun 1946. Pembentukan KBSI pada tahun 1953 merupakan hasil dari hasrat serikat-serikat buruh non-komunis untuk bersatu dan menahan kekuatan SOBSI. Penciptaan SBII merupakan sepeuhnya pekerjaan Partai Masyumi. Selama persiapan bagi pembentukan HISSBI pada tahun 1952 dan 1953 para anggota terkemuka Partai Buruh memainkan suatu peranan dominan. SOBRI dibentuk pada tahun 1951 oleh para anggota partai Murba. SARBUMUSI didirikan sebagai suatu implementasi dari resolusi Dewan partai Nahdatul Ulama pada tahun 1954. Di tahun 1952 Partai Nasional Indonesia (PNI) membentuk Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM). Partai Islam PSII di tahun 1959 membentuk GOBSI. Orang-orang Katolik membentuk Ikatan Buruh Pancasila.³⁰

Organisasi-organisasi regional ini terdiri atas serikat-serikat buruh dalam industri yang sama dan diorganisasi secara sendiri-sendiri menurut berbagai perusahaan di daerah yang sama. Di kota Surabaya terdapat juga federasi-federasi serikat-serikat buruh lokal yang beroperasi di dalam industri yang sama, lazimnya dibidang perdagangan, impor dan ekspor atau di dalam usaha-usaha industri kecil. Serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan federasi-federasi regional atau lokal tidak merupakan bagian dari serikat-serikat buruh nasional.

Serikat-serikat buruh penting di kota Surabaya yang berafiliasi dengan SOBSI pada tahun 1957 antara lain SBPP, SBKA, SBKB, SB POSTEL, SBPI, SBIM, PERBUM, SEBDA, dan SARBUFIS. Serikat-serikat buruh lokal di Surabaya yang tidak bergabung dengan federasi di tingkat nasional yaitu S.B. Kooy&Cistenvan Voorhont, S.B.I.H.M, S.B. Internatio, S.B.I.R., S.B.I.M.M, S.B. A.I.A Bureau dan masih banyak serikat lainnya.

Munculnya kehidupan serikat buruh berontak dari kepentingan langsung untuk perbaikan syarat – syarat ekonomi dan sosial bagi kehidupan kaum buruh, kaum buruh menyatukan diri dalam wadah organisasi

²⁹ Tedjasukmana, Iskandar. *op. cit.*, hal : 140

³⁰ Cahyono, Edi dan Soegiri DS.*op. cit.*, hal: 2

berupa serikat buruh. Dengan berkembangnya kapitalisme, berkembang pula jumlah kaum buruh sebagai penjual tenaga kerja. Tugas – tugas yang membebani serikat buruh pun semakin bertambah banyak dan semakin bervariasi. Lama kelamaan tuntutan-tuntutan dan aksi-aksi kaum yang diorganisasi oleh serikat buruh semakin melewati jangkauan lama.

Walaupun dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1948 tentang Kerja telah dijelaskan bahwa setiap buruh tidak boleh bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, rata-rata perusahaan di Surabaya memperkerjakan buruhnya 8-9 jam sehari dan 45-54 jam seminggu. Ketentuan mengenai upah ditetapkan oleh Djawatan Perburuhan.

Hingga tahun 1959, berbagai terjadi beberapa aksi protes buruh di Surabaya. Tuntutan radikal di sampaikan oleh Sarikat Boeroeh Daerah Autonom bagian Pemakaman pada tanggal 30 Juni 1951. Tuntutan tersebut meliputi kejelasan organisasi serikat buruh, persamaan perlakuan buruh, beban kerja dan besaran upah, keterlambatan pembayaran upah, jaminan kesehatan untuk buruh beserta keluarganya.

Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran juga melakukan pemogokan pada masa kabinet Wilopo. Walaupun dalam pernyataannya tidak ingin melakukan pemogokan besar-besaran. Hal ini dikarenakan SBPP tidak ingin kabinet Wilopo mendapatkan kesukaran. Hingga terjadinya aksi protes itu, pekerjaan di pelabuhan sudah banyak mengalami kesulitan dan barang sudah mulai bertumpuk, akan tetapi bagi SBPP ini hanya protes kecil.

Dalam perjuangan kenaikan upah Serikat Buruh Kendaraan Bermotor mengadakan protes dengan mogok-duduk. Sebelum mulai mogok-duduk, SBKB menyerukan pada sopir-sopir taxi agar tidak menaikkan tarifnya selama pemogokan. Tujuan daripada aksi ini ialah untuk meminta kenaikan upah. SBKB menganggap sopir taxi yang tidak ikut mogok malah akan bekerja keras.

Beberapa aksi tentang kondisi kerja juga terjadi di Surabaya. Diantaranya yaitu pada bulan Maret 1955, S.B.H.R.T ranting Hotel Sempang yang tergabung dalam SOBSI melakukan aksi mogok duduk selama seminggu dikarenakan adanya pemecatan terhadap pekerja di hotel Carlton, Hollywood dan Grand. Dalam tuntutananya S.B.H.R.T menyatakan agar perusahaan menarik kembali keputusan pemecatan dan mengancam akan meneruskan aksi yang akan diikuti (solidaritas) di hotel-hotel lainnya termasuk di Hotel Sempang.

Aksi mogok karena kondisi kerja juga dilakukan anggota serikat buruh di Perusahaan Bioskop Surabaya. Pemogokan buruh terjadi karena perlakuan sewenang-wenang dari pihak majikan. Salah satu buruh dipecat karena dianggap kurang cakap, melakukan indisipliner, malas dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Sehingga mendorong kawan-kawannya untuk melakukan aksi protes berupa pemogokan.

D. Peran Buruh dalam Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Surabaya

Kegagalan dalam upaya untuk mewujudkan ekonomi nasional ditafsirkan oleh para pemimpin Indonesia sebagai kegagalan mengatasi dominasi perusahaan-perusahaan Belanda. Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani para pemimpin republik di Den Haag pada tahun 1949 memuat jaminan bahwa hak-hak yang diberikan kepada modal asing akan dihormati. Dengan itu berarti perusahaan-perusahaan Belanda tetap mengendalikan sektor-sektor ekonomi utama.

Sehubungan dengan dibatalkannya perjanjian KMB pada tahun 1956, serikat-serikat buruh memberikan dukungan kepada pemerintah untuk segera mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Selain melakukan aksi-aksi mogok, dalam menyikapi situasi politik dan ekonomi nasional, kaum buruh juga mengajukan resolusi-resolusi kepada pemerintah terutama yang berkaitan dengan keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda.

Sarbupri dalam kongresnya di Malang pada tanggal 6-9 Juni 1956, salah satu resolusinya mendesak keras pemerintah agar menyita seluruh milik Belanda sebagai imbalan pendudukan Belanda atas Irian Barat. Demikian juga resolusi yang diajukan Serikat Buruh Percetakan Indonesia (SBPI) yang berafiliasi dengan SOBSI, mendesak pemerintah untuk meniadakan hak-hak Belanda sehubungan dengan pembatalan perjanjian KMB.³¹

Hampir semua sektor ekonomi Indonesia sampai tahun 1957 masih dikuasai oleh modal Belanda. Upaya untuk mewujudkan ekonomi nasional akan selalu akan selalu terhalang selama modal asing, dalam hal ini Belanda masih beroperasi di Indonesia. Salah satu jalan keluar untuk mengakhiri dominasi perusahaan Belanda adalah dengan jalan melakukan nasionalisasi.

Pada bulan November 1957, ketegangan politik dalam negeri Indonesia semakin meningkat. Pada tanggal 29 November, PBB kembali menolak resolusi Indonesia yang menghimbau agar Belanda mau merundingkan kembali masalah Irian Barat. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara terhadap resolusi Indonesia, Presiden Soekarno telah memperingatkan bahwa Indonesia akan mengambil langkah yang akan mengguncangkan dunia apabila resolusi tersebut gagal. Ternyata presiden Soekarno tidak hanya menggertak, pada tanggal 1 Desember 1957 pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan akan mogok selama 24 jam terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.

³¹ Kanumoyoso, Bondan, *op.cit.*, hal : 44

Tindakan inilah yang mengawali aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.

Surabaya sebagai salah satu basis Industri di Indonesia menjadi salah satu kota yang penting dalam agenda nasionalisasi. Kondisi ini tentunya tidak mengherankan mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan Belanda yang berada di Surabaya. Perusahaan-perusahaan perindustrian atau perdagangan besar milik Belanda di Surabaya yang dikenai nasionalisasi, antara lain *Hoofdbedrijven Botsumij, N.V. internationale Credit-en Handels-Vereniging Rotterdam, N.V. Machinefabriek Braat, N.V. Verenigde Javasche Houthandel Mij, N.V. Drukkerij Fuhri, dan J.F. Esser N.V.* Nasionalisasi juga meliputi perusahaan-perusahaan kereta api milik Belanda di Surabaya yaitu *N.V. Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij dan N.V. Oost Java Stoomtram-Maatschappij.* Perusahaan Listrik "Aniem", *W.E.M.I, BMI, M.E.W.A.I.* juga dikenai nasionalisasi.

Dalam situasi demikian, kehadiran perusahaan-perusahaan Belanda semakin mendapat tekanan yang keras, terutama dari serikat-serikat buruh yang mendesak pemerintah untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Hanya dibutuhkan suatu pemicu, maka serikat-serikat buruh tersebut akan mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda.

Sebagai kelanjutan dari aksi mogok tersebut, rapat Dewan Menteri pada tanggal 5 Desember memutuskan bahwa seluruh transfer keuntungan perusahaan-perusahaan Belanda dibekukan. Perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih oleh buruh perusahaan itu dikuasai pemerintah dan pimpinannya diserahkan kepada suatu badan pengawas. Bersama dengan itu, Menteri Kehakiman Maengkom menyatakan pelarangan pengambilalihan perusahaan Belanda oleh para buruhnya. Pengambilalihan dilakukan oleh penguasa militer untuk kepentingan keamanan.³² Pengambilalihan dilarang kalau maksudnya sekedar merampas harta milik Belanda.

Dipicu oleh aksi mogok total para buruh, aksi pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, telah terlanjur menggelinding bagaikan bola salju. Dalam aksi-aksi pengambilalihan, serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan SOBSI memainkan peranan penting. Hal ini dapat difahami karena SOBSI merupakan federasi serikat buruh yang sebelumnya paling gencar menuntut pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda.

Dalam pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda peranan kaum buruh tidak dapat diabaikan. Diantara serikat-serikat buruh yang ada, SOBSI sebagai

serikat buruh terbesar memiliki anggota yang bekerja sebagai buruh hampir di semua perusahaan-perusahaan Belanda di Surabaya. Sebagai bagian yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi perusahaan-perusahaan asing tersebut, kaum buruh merupakan motor penggerak utama bagi kegiatan suatu perusahaan. Sebagai induk organisasi SOBSI mengerahkan anggotanya untuk melakukan pemogokan-pemogokan mendorong pengambilalihan perusahaan Belanda di Surabaya.

Dukungan paling kuat dari tindakan pengambilalihan datang dari kaum buruh. Buruh di Surabaya yang terlibat dalam pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda di Surabaya antara lain Serikat Buruh Industri Metal (SBIM) yang ikut berperan aktif dalam pengambilalihan *N.V. Machinefabriek Braat, C.V.Mf. de Vulkaan, N.V. De Indonesische Industrie, Fa. De Oosthoek, Mf. De Nijverheid.* Serikat Buruh Percetakan Indonesia (SPBI) berperan dalam pengambilalihan *N.V. Drukkerij Fuhri, N.V. Surabayasche Handelsblad, N.V. De Malanger, N.V. De Grafika, N.V. E. Fuhri & Co, C.V. Amsterdamsche Import Mij, Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) di J.F. Esser N.V., dan SARBUMIKSI di N.V. Oliefabriek Ngagel*

Pada awalnya, aksi anti Belanda ini dipimpin oleh Komite Aksi Pembebasan Irian Barat yang didukung oleh pemerintah. Tetapi pada pelaksanaannya, aksi pengambilalihan di beberapa perusahaan dilakukan secara independen oleh serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan SOBSI dan KBKI. Pada tanggal 13 Desember hampir bersamaan semua perusahaan-perusahaan Belanda telah diambil alih. Angkatan Darat (AD) menatap penguasaan atas perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih tersebut. Tindakan ini dilakukan AD untuk menghindarkan jatuhnya perusahaan-perusahaan tersebut ke tangan komunis. PKI dan SOBSI yang tidak menghendaki terjadinya konfrontasi fisik secara langsung dengan AD, segera menjanjikan dukungan mereka untuk menjaga agar perusahaan-perusahaan tetap berjalan.

Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan aksi pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda itu sebagai tekanan yang ditujukan kepada pemerintah Belanda dalam memaksa mereka melanjutkan perundingan masalah Irian Barat. Disamping itu, bagi Indonesia aksi pengambilalihan itu dianggap sebagai pelaksanaan dari keputusan pembatalan KMB pada tahun 1956.

Mengenai aksi pengambilalihan yang dipelopori oleh kaum buruh, menurut Djuanda hal itu dikarenakan ada tanda-tanda dari pihak manajemen perusahaan untuk mempersulit keadaan. Tindakan mempersulit itu seperti instruksi-instruksi yang diberikan ataupun pelarian modal secara diam-diam dengan melakukan transfer uang ke luar negeri. Dengan demikian aksi para buruh itu ditujukan untuk secepatnya mencegah

³² *Harian Pedoman*, 6 Desember 1957

dipindahkannya segala aset perusahaan-perusahaan Belanda.

PENUTUP

Sejarah terbentuknya buruh di Indonesia berbeda dengan terbentuknya buruh pada umumnya di Negara kapitalis. Lahirnya buruh di Indonesia lebih dipengaruhi oleh masuknya arus modal dari luar. Pada masa kolonial seluruh ekonomi dikontrol oleh Belanda. Perkebunan, ladang minyak, tambang, pabrik, kereta api, perkapalan, ekspor-impur, perbankan dan jasa-jasa umum dimiliki oleh Belanda. Dalam kondisi yang tereksplotasi, kaum buruh memandang Belanda sebagai sumber kejahatan. Sehingga serikat-serikat buruh menginginkan tujuan politik yaitu ditumbangkannya imperialisme Belanda. Dalam perkembangannya gerakan buruh di Indonesia senantiasa berdampingan dengan perjuangan kemerdekaan nasional

Perubahan situasi sosial-ekonomi dan politik Indonesia pasca penyerahan kedaulatan Republik Indonesia mendorong munculnya berbagai organisasi-organisasi buruh. Hal ini dipengaruhi oleh dikeluarkan beberapa undang-undang yang cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan pada buruh. Sumbangan bagi keberhasilan mencapai kemerdekaan menjamin gerakan buruh mendapat posisi yang baik setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Selain kondisi politik dan ekonomi nasional, yang turut memberikan pengaruh atas terbentuknya organisasi-organisasi buruh ialah ideologi-ideologi dan partai-partai politik. Terutama pengaruh ideologi-ideologi politik yaitu nasionalisme, ide-ide politik islam dan sosialisme.

Lokasi yang sangat strategis telah membuat kota Surabaya menjadi kota industri, dagang dan maritim sejak lama. Sejak masa Liberal tahun 1870, Surabaya telah tumbuh menjadi kota Industri. Perusahaan-perusahaan Belanda telah berdiri di Surabaya semenjak masa kolonialisme. Dalam masa demokrasi liberal orde lama banyak berdiri organisasi-organisasi buruh di Surabaya, baik serikat buruh lokal ataupun yang bergabung pada konfederasi-konfederasi buruh nasional. Hal tersebut menjadikan Surabaya sebagai salah satu basis gerakan buruh di Indonesia.

Serikat buruh pada dasarnya bukan partai politik. Untuk kepentingan langsung kaum buruh, serikat buruh sehari-harinya lebih banyak hanya menekuni kegiatan untuk perbaikan upah, jaminan sosial dan syarat – syarat kerja kaum buruh. Di dalam kondisi sistem kapitalisme masih berlaku, serikat buruh memang bergerak dalam batas kegiatan reform. Diatas aksi-aksi bertema sosial-ekonomi, serikat buruh terkadang melakukan aksi yang lebih tinggi lagi yaitu aksi politik. Di dalam aksi revolusioner, serikat buruh tidak langsung ambil bagian, meskipun ada kaitannya karena mengorganisasi massa kaum buruh.

Dalam banyak hal gerakan serikat buruh Indonesia merupakan suatu dari citra revolusi nasional. Pasca Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar dan

dikeluarkannya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, semua gerakan buruh menghendaki likuidasi total dari sisa-sisa kolonialisme dan transformasi dari perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hampir semua serikat buruh di Surabaya terlibat dalam langkah pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda di Surabaya.

Gerakan buruh pada umumnya terjadi ketika realitas subyektif buruh yaitu pengaruh ideologi, keyakinan dan agama yang berhadapan langsung dengan kondisi obyektif di masyarakat seperti kemiskinan. Perjuangan buruh pada awalnya hanya terkait perjuangan normative berupa upah layak, kondisi kerja serta jaminan sosial. Situasi ekonomi dan politik nasional telah mendorong buruh untuk terlibat dalam perjuangan nasional berupa pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda di Surabaya.

Buruh adalah salah satu elemen masyarakat yang sangat potensial dan sangat menentukan nasib Negara ini ke depan. Setiap zaman membuktikan potensi buruh yang sangat besar untuk mengubah atau mempertahankan *status quo*. Penelitian mengenai buruh dan gerakan buruh di Surabaya belum banyak ditemukan khususnya dalam mengkaji secara langsung kehidupan para buruh dan kontradiksinya dengan industri, kesejahteraan buruh, serta penyebab utama buruh melakukan mobilitas massa secara besar-besaran masihlah belum terjamah dalam penelitian-penelitian sejarah sosial.

Dengan kajian perburuhan yang obyektif, nasib buruh yang selama ini masih tertindas hak-hak normatifnya maka perlu adanya peran negara. Negara harus bertanggung jawab atas terabaikannya hak-hak ekonomi dan sosial politik buruh. Perlu adanya pelurusan sejarah sebagai salah satu dasar untuk dapat meninjau ulang peraturan-peraturan perburuhan yang merugikan buruh sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Edi. 1991. "Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan: Studi Karesidenan Pekalongan 1830-1870" *Prisma*. No.11
- Cahyono, Edi dan Soegiri. 2003. *Gerakan Serikat Buruh, Perburuan dari Masa ke Masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru (Indonesia 1998)*, Jakarta: Hasta Mitra
- Gie, Soe Hok. 1999. *Di Bawah Lentera Merah*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya
- Ingleson, John. 2004. *Tangan dan Kaki Terikat: dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Jan Breman, 1997. *Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20*, Grafiti Pers

- Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Louis Gottschalk, 1981, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Nugroho Notosusanto, 1978, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu press
- Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, cet I*. Jakarta: Serambi
- Sandra, 2007. *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*, Jakarta: TURC
- Sadali. 2002. *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*. Jakarta : Pustaka Pena
- Saptari, Ratna dan Erwiza Herman (ed). 2013. *Dekolonisasi: Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta
- Saskia Eleonora. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya
- Takashi Shiraisi. 1990. *Zaman Bergerak : Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. New York : Cornell University Press
- Tedjasukmana, Iskandar. 2008. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. Jakarta: TURC
- Trimurti, S.K., 1980. *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*. Jakarta : Yayasan Idayu
- Sakirman. 1959. *Tentang Ekonomi dan Keuangan (pdf format)*. Ekonomi dan Masyarakat No.I, <http://www.geocities.com/edichy>

